

*Paper: Sebagai bahan Workshop **Camp Peace / Perdamaian** selama 3 hari, diselenggarakan oleh "Aceh flower Generation", bekerja sama dengan **American Friends Service Coomitte** di Lhokseumawe tanggal 22-25 April 2006.*

GERAKAN SOSIAL BARU DALAM PERSPEKTIF GLOBAL
(*Realitas New Social Movement In Aceh*)¹

Kamaruddin Hasan²

Pengantar

Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan Workshop selama tiga hari dalam sesi "kajian Gerakan Sosial Baru (GSB)" atau sering disebut *new sosial movement* atau boleh kita sebut juga *Global Civil Society* (GSC) yang sudah sejak lama dipraktekkan oleh kalangan aktivis diberbagai belahan dunia. Tentu dengan bentuk dan format yang berbeda sesuai dengan perkembangan. Gerakan sosial ini, secara simultan berubah dari waktu ke waktu.

Masa pra perang dunia II gerakan ini lebih pada gerakan kaum buruh, kemudian berkembang pasca perang dunia II lebih pada kombinasi gerakan dengan melibatkan heterogonitas komunitas. Selanjutnya perbedaan ini muncul dengan hadirnya tehnologi komunikasi dan informasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Uraian dalam tulisan ini akan dimulai dengan gambaran umum tentang gerakan Sosial Baru, pola kekerasan yang dipraktekan oleh sistem kekuasaan yang kemudian melahirkan gerakan sosial "baru"?, termasuk karakteristik kajian sosial baru---kajian sosial kritis, konsepsi gerakan sosial, bentuk-bentuk gerakan sosial, aktor gerakan sosial dan beberapa konsepsi lain yang dianggap merepresentasikan gerakan sosial di dunia. Kemudian dari semua paparan kita coba integrasikan dengan gerakan sosial yang terjadi di Aceh.

Memang ketika dianalisa bahwa gerakan sosial baru tidak mudah diidentifikasi--gerakan sosial yang terjadi dalam sistem negara, pemerintahan, masyarakat, komunitas, suku—etnis, daerah, kelompok bahkan individu juga dapat dikategorikan gerakan sosial. Jadi dimana kemudian letak persoalan sehingga gerakan sosial baru muncul bak jamur dimusim hujan di seluruh dunia tak terlepas Aceh sebagai daerah yang senantiasa didera konflik dan masalah?

Mendambakan Dunia yang Damai

Kita patut renung sejenak dimana cakrawala bumi pertiwi kita dipenuhi asap kelabu ketidakpastian seakan menutupi langit cerah dalam alam sadar - - bawah sadar kita-- di abad *global village* ini. Awan kelabu peradaban manusia kita lewati dilangit-langit harapan nurani manusia yang terasa kosong. Berbagai prediksi dipancarkan, harapan ditaburkan dan kekhawatiran

¹ Diambil dari berbagai sumber yang relevan

² Dosen Ilmu komunikasi fisis Unimal

ditadaruskan sementara kegelisahan masih tersimpan di balik-balik hati kita yang paling dalam.

Meminjam pendapat *Idi Subandi Ibrahim* dalam sebuah buku *Hegemoni Budaya* 1997, bahwa dari berbagai peristiwa yang kita saksikan lewat prisma berita global. Ternyata dunia yang kita bayangkan bukanlah wajah dunia yang penuh kedamaian dan tanpa kegelisahan. Tapi, malah kejutan-kejutan yang di dapatkan. Lihatlah peristiwa keberingasan manusia dalam menyelesaikan masalah, “boleh juga disebut sebagai gerakan sosial revolusioner yang tidak terkontrol”, seperti keberingasan massa, bom bunuh diri, penculikan, pembunuhan, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, perlawanan perempuan, konflik-konflik berkepanjangan di Indonesia seperti di Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan, Poso, DKI dan lain-lain diselesaikan dengan cara-cara kekerasan.

Lebih jauh, simak saja secara global kekerasan dipraktekkan diberbagai belahan dunia; Timur tengah, mesir, Turki di Bosnia, Tepi Barat Jalur Gaza, Korea Utara, Rwanda, Fhilipina, Pathani--Thailand, India, Amerika, Cina, Afrika dan lain-lain dengan berbagai latar belakang. Berbagai bentuk gerakan dan kekerasan bermuara pada ‘ketidakebusan’ mengurus sebuah sistem dan sub-sistem yang berada dalam sebuah Negara--Pemerintahan.

Mungkin bangsa-bangsa di seluruh dunia sepertinya perlu introspeksi dan meredefinisi kembali akan eksistensi dirinya, seperti seorang murid Filsuf Plato yang bernama Glaucon pernah bertanya sekaligus mengeluh kepada Gurunya Plato, “mengapa negara tidak habis-habisnya di dera masalah”. Dengan bijaksana Plato menjawab; kesulitan dan kendala itu tidak akan pernah putus. Ia memang akan terus menerus membelit Negara kita. Kesulitan itu juga menimpa kemanusiaan kita sendiri. Kesulitan itu akan hilang sampai para Filsuf menjadi Raja di dunia ini atau sampai mereka yang sekarang kita sebut Raja atau penguasa itu sungguh-sungguh menjadi Filsuf”.

Agaknya jawaban Plato patut kita jadikan renungan dan pelajaran yang berharga. Bahwa Penguasa mesti menjadi contoh dalam masyarakat bukan malah menjadi masalah. Masyarakat sudah bosan—‘muak’ dengan prilaku dan kebijakan penguasa dalam menyelesaikan berbagai masalah Bangsa. Kalau kita ambil Falsafah Carfesian yang menyakini eksistensi sebagai sebuah hasil pemikiran.

Maka keberadaan bangsa juga karena adanya proses kesadaran tersebut. Kita dikenal sebagai sebuah bangsa karena kita berpikir dan sadar akan akan sebuah bangsa, jika kita sudah tidak berpikir lagi, ketika kita berhenti menyadari diri sebagai sebuah bangsa saat itu pula kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa telah terhampas.

Kita sudah lama kehilangan identitas diri – mengalami de eksistensi diri berjalan sebagai sebuah bangsa. Penguasa atau sistem negara telah memonopoli makna kehidupan. Artinya sama saja mereka memonopoli kebenaran atau tafsir

menjadi monopoli, sampai-sampai merekayasa berbagai sistem bahkan individu harus mengartikan sebuah peristiwa secara seragam.

Monopoli makna sesungguhnya telah memonopoli kebenaran. Kebenaran bukan lagi milik masyarakat tapi sepenuhnya ditangan penguasa. Artinya telah terjadi krisis pemikiran, kebenaran dan krisis etika dan moral.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kekerasan dan keberingasan, budaya monolog, komunikasi top down (*Komunikasi gaya totaliterisme*), politik tanpa etika, mobilisasi massa beringas, media kekerasan sudah menjadi ciri khas manusia abad 21 ini?

Pada tataran praksis kekerasan kita pahami sebagai manifestasi akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Disini kita tidak mau mendefinisi kekerasan secara teoritis, akan tetapi lebih pada realitas yang sering kita terima melalui panca indera sehari-hari.

Kekecewaan terhadap praktek politik, ekonomi, kesenjangan sosial-budaya secara kotor telah membuat masyarakat kita kehilangan kontrol. Kekerasan sudah menjadi makanan pokok sehari-hari di negeri khatulistiwa ini dan dunia global.

Kekerasan menjadi jalan penyelesaian berbagai masalah. Wajah kekerasan dan keberingasan adalah fenomena kompleksitas, lintas disipliner, multikrisis, globalisasi budaya yang telah merongrong nurani dan jiwa hakikat manusiawi.

Perbedaan pendapat, beda bendera partai, beda pilihan politik, beda suku, beda negara, keyakinan, agama, dijawab dengan kekerasan oleh sistem yang berkuasa. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa warga kita cenderung mudah melakukan aksi kekerasan ketika berhadapan berbagai perbedaan.

Apakah masyarakat kita dapat dikatakan masyarakat multikultur atau masyarakat yang mempunyai jiwa etnosentrisme yang cenderung tidak dapat menerima kekalahan dan selalu merasa dirinya yang paling benar. Kemana sifat yang toleran, humanis, sportif dan saling menghargai serta mental ksatria sepertinya pupus di bumi ini. Upaya untuk menang sendiri dan unjuk kekuatan dengan memperagakan kekerasan menjadi jalan pilihan.

Mungkin ada beberapa masalah yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, masyarakat kita terlalu lama berada pada posisi yang lemah dan kalah. Bahkan posisi yang lemah tersebut terus dipelihara agar sama sekali tidak berdaya dan terus terkalahkan. Karena itu ketika ada peluang untuk keluar dari situasi tertekan sarat depresi, yang muncul adalah perasaan permusuhan sehingga terdorong membalas. Dorongan inilah yang sering memicu aksi-aksi kekerasan.

Kedua bangsa kita sudah lama mengalami krisis keteladanan. Para elite, para pemimpin, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat jarang muncul sebagai tokoh yang mengemban dasar-dasar moral dan budaya yang kuat. Tidak banyak

sosok dan pribadi yang patut menjadi referensi moral, budaya dan keteladanan yang patut ditiru masyarakat. Kondisi politik negeri ini pun sangat kurang mendukung, elite politik mana yang mempunyai kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Sejak 1997 hingga sekarang, elite kita masih saja sibuk memikirkan perebutan kekuasaan, baik melalui ajang politik nasional maupun regional.

Kekerasan secara konsep struktural intreraksi sosial dapat dipahami sebagai kedudukan komunitas dengan posisi subordinat paling bawah dan lemah yang cenderung rawan akan tindakan atau perilaku kekerasan dalam bentuk apapun dan kondisi kapanpun lambat atau cepat mengalaminya. Memang selama 33 tahun, kekerasan dan anti-dialog digunakan sebagai mekanisme untuk melanggengkan tatanan sosial dan stabilitas politik, pada saat yang sama menyemaikan bibit-bibit potensial konflik. Mekanisme kontrol ini juga menimbulkan efek sampingan yang membenarkan secara sosial penggunaan kekerasan untuk menangani soal heterogenitas dalam masyarakat (Jusuf & Desideria, 2001, 1 April).

Selain itu, masalah pendidikan agama dan sastra dan budaya yang dipahami hanya sekedar kulitnya saja atau lebih sekedar formalitas. Kita kurang memahami tentang eksistensi manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Sejak duduk di bangku sekolah kita sudah disodorkan pendidikan yang bersifat fisik. Konstruksi pemikiran yang bersifat abstrak seperti nilai-nilai Keagamaan, budaya dan sastra, serta moral, tak terhiraukan. Kemudian masalah komunikasi lintas budaya masih pada dataran teoritis-secara praksis belum berjalan di negara kita.

Abad Kekerasan

Lebih jauh kalau kita analisa secara global bahwa, ada sebuah pandangan abad 21, saat kapitalisme dan sosialisme yang sudah banyak dikritik dalam dataran konseptual maupun praksis, harus menghadapkan umat manusia dalam "abad kekerasan" atau *The Age of Violence*.

Abad ketika berbagai wajah kekerasan telah menemukan bentuknya yang luar biasa dalam universium sejarah kemanusiaan. Kalau kita ambil pendapat *Fukuyama*, dalam *The End Of Histori*. Bahwa dalam kurun pasca sejarah ini tidak ada lagi seni budaya atau filsafat, yang ada hanya pemeliharaan museum sejarah manusia yang berkelanjutan.

Karenanya akhir sejarah akan merupakan saat yang menyedihkan; saat keberanian, semangat, imajinasi dan idealisme akan digantikan oleh perhitungan ekonomis (tidak ada jiwa saling tolong menolong). Ledakan kekerasan ideologi juga menjadi salah satu dari sekian wajah kekerasan yang ditemui dalam negara bangsa ini. Sementara perdebatan ideologis menyangkut strategi-strategi ekonomi telah berubah menjadi konfrontasi yang penuh kekerasan.

=====

Padahal sejarah membuktikan, sekali dipakai kekerasan akan memasukkan lingkaran spiral sepresi, resistensi dan reaksi yang terus memuncak. Persoalan kekerasan juga diperkuat, ketika tehknologi canggih terus berkembang, disini ada mesin besar kekerasan yang tengah merepresentasikan diri.

Lihatlah media yang berada dalam gempaman hegemoni kekuasaan yang totalitarian yang dapat menjadi semacam “tirani terselubung” karena eksploitasi pikiran yang dimanipulasi lewat media lambat-laun akan menjelma menjadi sebuah sistem totaliter yang mengendalikan pikiran yang menyuburkan berbagai kekerasan dalam daratan kognitif dan psikologis.

Produksi kekerasan dalam panggung kapitalisme. Simaklah dimedia, manusia kini tidak saja memikirkan film yang estetis, tapi juga pembunuhan, perang, atau kekerasan yang estetis. Estetika tidak lagi merupakan suatu bentuk penggalian dan penampakan nilai-nilai luhur dalam kebudayaan seperti agama, moral dan etika, tapi kita dihadapkan pada wajah reproduksi dunia sosial lewat media yang penuh ironi dan tanpa identitas.

Adapula kekerasan yang menyatu dengan struktur sosial yang sesungguhnya lebih banyak mengandung kekerasan, yaitu kekerasan struktural. Akar dari wajah kekerasan hampir dapat dipastikan bermuara disini, karena kebanyakan bangsa tengah dilanda oleh proses transformasi sosial, budaya, politik dan ekonomi yang amat mendalam yang merupakan sumber ketidakstabilan dalam relasi-relasi kekuasaan.

Oleh karena itu, budaya kekerasan akan terus mencemarkan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Namun kita pun melihat ironi yang begitu sering diajar oleh sejarah bahwa penggunaan kekerasan justru telah menghancurkan tujuan dan cita-cita yang malah hendak dikejar, dan justru menciptakan ketidakadilan yang sama dengan apa yang hendak dihancurkan. Karena itulah stabilitas dibawah keadaan yang penuh penindasan berarti pelanggaran kekerasan.

Sepertinya *Soejatmoko* benar ketika ia mengatakan bahwa perjuangan tanpa kekerasan seperti diguklirkan *Gandhi* atau pengagumnya telah berubah dari suatu mimpi utopis menjadi suatu kebutuhan praktis. *Idi Subandi Ibrahim* mengingatkan kembali bahwa kita juga diingatkan oleh getaran-getaran perasaan yang mendalam yang sering dilupakan, bahwa dunia yang bebas dari kekerasan bukanlah dunia yang bebas dari konflik. Ini berarti menanggalkan kekerasan tidak berarti menghentikan perjuangan melawan kondisi-kondisi tidak adil dan menindas.

Satu sisi, proyek kemanusiaan yang mendamaikan terus dan tengah dipancarkan, pada saat yang sama di setiap sudut dunia wajah-wajah kekerasan terus memoles luka yang dalam. Sementara manusia sendiri masih peka terhadap reaksi-reaksi yang dijumpainya dari manusia lain disekitarnya.

Sebagai contoh, pada saat perjanjian damai Aceh terjadi di helsinky tahun 2005 lalu, masih ada juga elemen penguasa, masyarakat bahkan ada komunitas

=====

mahasiswa menolak perjanjian damai tersebut. Kita tidak tahu apa yang melandasi penolakan tersebut. Bisa terjadi dibalik kekerasan ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan secara politik dan ekonomi. Atau juga ada yang tidak bisa hidup tenang tanpa kekerasan, karena kekerasan sudah menjadi teman setia dan menjiwai alam kebudayaan.

Pada hal hanya dengan cinta-kasih sayang, tolong menolong kita dapat menikmati hidup secara sempurna. Namun mengapa saling pengertian dan kesetiakawanan sosial hanya sebatas kata. Apakah karena kejahatan dan kejelekan dengan sendirinya kebaikan dan keindahan ada?. Atau karena kekerasan, maka kita menyadari pentingnya kelembutan dan cinta kemanusiaan. Atau memang mesti ada kekacauan maka kemudian gerakan sosial akan muncul?

Konsepsi Gerakan sosial Baru

Konsepsi gerakan sosial baru, pada dasarnya memusatkan perhatian pada isu baru, kepentingan baru dan medan konflik baru. Berfokus pada peningkatan kualitas hidup, identitas kelompok, memperluas ruang kehidupan, soft civil society, lebih bersifat non-ekonomi, post-material dan lebih fokus pada masalah kultural yang berkaitan dengan otonomi individual dan resiko baru yang mempengaruhi orang dengan cara sama, terlepas dari posisi sosialnya.

Keanggotaannya non-kelas, lebih berpotongan dan mengungkap berbagai soal dari berbagai kelas sosial. Namun demikian, komposisi lebih identik dengan strata pendidikan tinggi dan menengah karena kesadaran politik, kebebasan, waktu dan tenaga yang lebih besar. Dan Jaringan hubungan luas dan relatif longgar ketimbang menggunakan organisasi yang kaku hirarkis.

Gumelar Sumantri, dalam acara *sekolah budaya berbasis sosial* yang diselenggarakan oleh Jurusan Antropologi Unimal, di Lhokseumawe maret 2006, menyebutkan makna perubahan sosial (Robert H.lauer, *perspektif tentang perubahan sosial*, Rineka Cipta: 2001) bahwa perubahan sosial adalah perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu hingga tingkat dunia.

Perubahan sosial adalah sesuatu yang normal dan berkelanjutan; yang tidak normal justru tiadanya perubahan atau ilusi tentang stabilitas. Perubahan bisa terjadi ditingkat global, peradaban, kebudayaan, masyarakat, komunitas, institusi, organisasi, interaksi dan individu.

Bentuk-bentuk perubahan sosial, disebutkan oleh Drs. Sidi Gazalba, dalam *Islam dan perubahan sosiobudaya*, (pustaka Alhusna, 1983). *Evolusi Sosial*, perubahan yang lambat, perlahan-lahan, setahap-demi setahap, jangka panjang. Seperti sistem demokrasi di Indonesia, ekonomi islam atau santrinisasi Indonesia.

Revolusi sosial, perubahan yang cepat dan radikal dari struktur sosial yang berlaku. Revolusi di Aceh, Iran, Moro dan lain-lain. *Perubahan berpengaruh kecil*. Misalnya perubahan logat atau gaya bahasa, cara berpakaian, tren anak-

=====

muda. *Perubahan berpengaruh besar*, perubahan dari status negara jajahan menjadi merdeka atau cara pandang ideologi, agama.

Perubahan yang dikehendaki, Direncanakan secara sadar melalui *sosial Planning* atau *sosial engineering oleh agen-agen perubahan*. Seperti *perubahan sistem hukum* perubahan bentuk negara dari persatuan ke federasi dan otonomi dan lain-lain. *Perubahan yang tidak dikehendaki*, tanpa dimaksudkan dan direncanakan oleh agen-agen perubahan. Misalnya perubahan orientasi budaya kaum muda yang tidak dikehendaki oleh rumusan budaya lama/tradisional/lokal.

Terminologi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan, perubahan –perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Masalah sosial merupakan kondisi tertentu didalam masyarakat yang dianggap tidak enak atau mengganggu oleh sebagian anggota masyarakat dan dianggap dapat dikurangi atau dihilangkan dengan upaya kolektif.

Perubahan sosial juga terjadinya perubahan bentuk dan fungsionalisasi kelompok, lembaga atau tatanan sosial yang urgen. Rekayasa sosial adalah tindakan untuk mengatasi atau mengurangi masalah sosial.

Ciri-ciri dari proses perubahan sosial antara lain; Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat atau lambat. Perubahan pada lembaga kemasyarakatan tertentu, akan diikuti perubahan lembaga-lembaga sosial lainnya, kerana bersifat interdependensi/mata rantai.

Perubahan cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi secara sementara untuk di adaptasi. Disorganisasi akan diikuti reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah dan nilai baru. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena kedua bidang tersebut timbal balik.

Secara Tipologis perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai: social process : the circulation of various rewards, facilities, and personnel in an existing structure. Segmentation : the proliferation of structure units that do not differ qualitatively from existing units. structural change : the emerge of qualitatively new complexes of roles and organization.

Sedangkan penyebab perubahan sosial, secara Internal atau dalam masyarakat, antara lain: Penemuan- penemuan baru / inovasi, pertentangan- pertentangan dalam masyarakat dan terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Secara Eksternal atau luar masyarakat; antara lain; Perubahan lingkungan fisik (banjir, bencana, dll), Peperangan, juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Faktor pendorong perubahan social, misalnya kontak dengan kebudayaan lain (*intra society diffusion dan inter-society difusion*), sistem pendidikan formal yang

7

=====

*Paper: Sebagai bahan Workshop **Camp Peace / Perdamaian** selama 3 hari, diselenggarakan oleh "Aceh flower Generation", bekerja sama dengan **American Friends Service Coomitte** di Lhokseumawe tanggal 22-25 April 2006.*

maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan maju. Toleransi terhadap masyarakat (open stratification), penduduk yang heterogen (multikultur), ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Orientasi ke depan, berkembangnya nilai bahwa manusia senantiasa berusaha untuk memperbaiki hidupnya.

Faktor – faktor Penghambat perubahan social, antara lain; kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat sangat tradisional, adanya kepentingan – kepentingan yang telah tertanam kuat, rasa takut akan tergojahan akan integrasi, prasangka akan hal baru atau asing dan sikap tertutup, ideology, adat dan kebiasaan, berkembangnya nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak mungkin diperbaiki dan *Etnosentrisme*.

Sedangkan pola dan bentuk Perubahan Sosial, dapat dibedakan; Pola Linear atau unilinear; Contoh : Hukum Tiga Tahap (comte) Teologis Militer, Metafisik Yuridis, dan Ilmu Pengetahuan dan Industri. Spencer adalah struktur sosial berubah secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen. Perubahan struktur diikuti perubahan fungsi dan Perubahan senantiasa diikuti kemajuan. Pola Siklus; masyarakat berkembang laksana suatu roda, kadang di atas kadang di bawah, spengler adalah the great cultures accomplish their majestic wave cycles. They appear suddenly, swell in spendid lines, flatten again, and vanish...dan Vilfredo Parteo adalah sirkulasi kaum elit. Dalam tiap masyarakat terdapat dua lapisan, lapisan non elit. Elit senantiasa mengalami transformasi dan akan diganti elit lain dari lapisan bawah.

Gabungan beberapa pola yaitu gabungan pola linear dan siklus. Teori konflik Karl Marx, sejarah perjuangan kelas (siklus), gagasan komunisme merupakan bentuk lain dari komunisme primitif (siklus), perkembangan pesat kapitalisme akan menghasilkan komunisme (linear), negara jajahan Barat akan mengalami proses yang dialami masyarakat Barat (linear). Max Weber, Pembagian wewenang kharismatis, rasional-legal dan tradisional (siklus), peningkatan rasionalitas dalam masyarakat (linear).

Strategi Perubahan Sosial seperti Power Strategy, Strategi perubahan sosial dengan kekuasaan, Persuasive, Strategi perubahan sosial dengan pembentukan opini masyarakat dan Normative-reeducative, strategi perubahan sosial dengan sosialisasi norma-norma baru dalam masyarakat.

Unsur-unsur Rekayasa Sosial; *Cause*, penyebab atau tujuan suatu rekayasa social. *Change agent*, golongan atau kelompok yang melaksanakan rekayasa social. *Change target*, sasaran kelompok golongan atau lembaga. *Channel*, media yang digunakan. *Change strategy*, tehnik utama yang digunakan memberikan dampak perubahan pada sasaran.

Tipe Gerakan Sosial, tujuan perubahan; terbatas seperti gerakan reformasi, menyentuh landasan organisasi sosial dan gerakan radikal. Semua aspek struktur sosial termasuk gerakan revolusi. Sedangkan target perubahan adalah

=====

Sosial Politik (*economic and political power*) dan Sosial-kultural (*values and norms*)

Di Indonesia gerakan sosial baru tumbuh subur sejak runtuhnya rezim Soeharto. Ketika itu manusia Indonesia bak burung lepas dari sangkar, bebas mengungkapkan keprihatinan menjalin kerja sama dalam memperjuangkan keprihatinan yang sama.

Di belahan Dunia lain, gerakan semacam ini sudah menjalani sejarah yang cukup panjang, misalnya “world sosial forum”, atau aneka “sosial forum” di beberapa negara. Dalam Jurnal Basis edisi Januari-februari 2006, D.Wibowo memaparkan sekilas tentang gerakan sosial baru. Bahwa letak kebaruan dalam gerakan sosial sulit didefinisikan.

Dikalangan para ahli, untuk mendefinisikan “gerakan sosial” saja tidak mudah dicapai kesepahaman, apalagi ditambah atribut “baru”. Namun demikian secara sederhana dapat dibedakan dari gerakan sosial lama yaitu lebih kepada gerakan kaum buruh terutama di negara-negara yang lebih dulu mengalami industrialisasi. Gerakan-gerakan gereja masa itu juga dapat dikategorikan gerakan sosial lama.

Namun setelah perang Dunia II multi gerakan muncul dengan mobilitas dan dinamikan tinggi. Ada gerakan anti perang, lingkungan, kaum perempuan, mahasiswa. Sasarannya juga beragam, ada yang melawan hegemoni negara dan kekuasaan, sistem desentralistik dan lain-lain.

Alberto Melucci mencoba untuk menemukan ciri-ciri yang menyatukan gerakan ini. Bahwa gerakan ini berupa jejaring kelompok-kelompok kecil yang tenggelam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling berhubungan, saling bertemu di aneka tempat, di berbagai kesempatan, tidak menghalangi penambahan anggota, dari berbagai bangsa, negara, ideologi, agama. Ciri dari mereka adalah dituntut sikap serius dan kritis terhadap masalah yang dihadapi, keterikatan pribadi dan solidaritas afektif jika mau menjadi anggota.

Pada zaman globalisasi sekarang ini, ciri “baru” itu semakin kentara. Gejala ini menguat seiring dengan gerakan-gerakan di tingkat global yang berhasil menggalang orang-orang dari seluruh dunia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi paling mutakhir. Babak baru munculnya *global civil society (GSC)*. Gerakan sosial baru telah menggejala di seluruh dunia. Tidak mungkin lagi membatasi gerakan sosial pada gerakan buruh.

Dalam sebuah buku berjudul *Global Civil Society 2002*, juga mencata dinamika gerakan-gerakan sosial baru yang mendunia. Gerakan sosial baru atau kita sebut juga Konsep *Global Civil Society (GSC)*, memang pada awalnya dipakai pada tingkat Nasional kerana memang konsep ini memiliki makna yang dibedakan dari negara maupun dari pasar. Dalam teori politik acap kali diletakan sebagai alternatif dari negara dan *market*. Konsep ini kalau dibawa ke tingkat global, akan muncul masalah karena ditingkat global tidak ada “negara”.

=====

Namun, kalau mengingat bahwa tingkat global terdapat tata internasional yang berpusat pada negara dan juga pasar global, maka konsep itu bisa dipertahankan, yang mencakup: Ornop Internasional, aktivis politik, gerakan sosial, kelompok dedominasi agama, asosiasi-asosiasi, gerakan mahasiswa. Tak heran kalau muncul pendapat bahwa GCS mempunyai daya kekuatan menetralkan kekuasaan yang sangat efektif. Banyaknya studi dan teori-teori mengenai gerakan sosial (*social movement*) terakhir ini, menarik karena banyaknya fenomena yang berkembang sejak awal Abad ke 20.

Khususnya gerakan Mahasiswa pada tahun 60 an di banyak Negara di semua belahan Dunia. Sekalipun demikian, terminologi Gerakan Sosial ini sering kali *implisit* di defenisikan secara heterogen terhadap sejumlah fenomena-fenomena sosial politik seperti revolusi, sekte-sekte keagamaan, organisasi-organisasi politik, atau suatu isu yang mengkampanyekan banyak hal.

Banyak pihak yang membahas gerakan sosial langsung kepada hal-hal yang dianggap paling substantif, di antaranya faktor-faktor yang dihitung bagi proses mobilisasi, atau perbedaan antara gerakan sosial lama (*old social movements*), atau juga dengan mengadopsi sejumlah konsep seperti “aksi kolektif” (*collective action*). “perubahan sosial” (*social change*), “konflik sosial” (*social conflict*), dan lain-lainnya.

Diskusi mengenai konsep gerakan sosial banyak muncul dari berbagai pendekatan paradigmatis (*school of thought*). Secara umum banyak yang mengkonotasikan bahwa gerakan sosial sebagai sebuah dinamika sebuah sosial yang berjalan secara khusus. Ada pandangan yang melihat bahwa gerakan sosial ada dalam sebuah proses di mana sejumlah aktor-aktor yang berbeda, baik secara Individual, kelompok-kelompok informal dan atau organisasi-organisasi, melakukan *elaborasi* melalui aktivitas aksi bersama, kemudian mendefinisikan secara bersama bahwa mereka adalah satu bagian dari sebuah posisi tertentu dalam sebuah konflik sosial.

Dengan begitu mereka memberikan pemaknaan terhadap *event-even* protes maupun praktik-praktik antagonis simbolis lainnya yang belum berkaitan. Dinamika ini terefleksi dalam definisi yang melihat gerakan sosial sebagai bagian dari jaringan kerja atau interaksi informal di antara pluralitas individu-individu, kelompok-kelompok dan atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam sebuah konflik politik atau kultural dengan berbasiskan pengelompokan berdasarkan identitas kolektif.

Dapat dijelaskan secara umum ada empat perspektif penting dalam mengisi perdebatan tentang gerakan sosial.

Pertama dan paling banyak dirujuk adalah perspektif “perilaku kolektif” (*collective behavioral*); *kedua* “teori mobilisasi sumber” (*resource mobilisation theory*); dan terakhir pendekatan “gerakan-gerakan sosial baru” (*new social movement*). Pendekatan gerakan sosial baru, berusaha melihat hubungan antara gerakan –gerakan sosial dengan perubahan struktural dan kultural dalam skala

besar. *Alain Touraine* mengidentifikasi keterkaitan gerakan sosial adanya konflik dominan yang sudah ada dalam masyarakat.

Menurutnya, gerakan sosial merupakan “perilaku dan tindakan kolektif yang terorganisir oleh aktor berbasiskan kelas yang berjuang melawan kelas yang menjadi lawan untuk mengambil kontrol sosial secara historis dalam sebuah komunitas yang konkrit.

Gerakan sosial baru adalah kombinasi prinsip identitas, prinsip oposisi, dan prinsip totalitas, dimana aktor-aktor sosial mengidentifikasi diri mereka, lawan mereka, secara sosial dan tingkatan-tingkatan dalam konflik. Gerakan ini muncul dalam konteks adanya *core* konflik baru dalam masyarakat *post-industrial* kontemporer.

Namun bagi Melucci, bahwa gerakan sosial tidak dapat disamakan begitu saja dengan konflik-konflik politik yang “kasat mata”, karena dalam faktanya aksi publik hanyalah salah satu bagian dari pengalaman gerakan sosial. Gerakan-gerakan sosial walaupun tidak tampak secara publik tapi terus aktif melakukan produksi di wilayah kebudayaan.

Jadi secara umum dinamika gerakan sosial baru dapat dilihat dari; *pertama*, adanya jaringan kerja dan interaksi informal; *kedua*, adanya kesamaan keyakinan (*shared beliefs*) dan solidaritas; *ketiga*, aksi kolektif atas isu-isu konfliktual; dan *keempat*, aksi yang menunjukkan ruang yang luas di luar institusionalitas dan prosedur-prosedur rutin kehidupan sosial.

Menurut Teuku kemal Fasya dalam bukunya *Ritus kekerasan dan Libido Nasionalisme* 2005, bahwa Gerakan sosial berbeda dari pergerakan massa meskipun dalam praktiknya gerakan sosial misalnya di Aceh banyak diisi oleh gerakan massa, perbedaan pengertian kedua istilah diatas dapat digambarkan bahwa gerakan sosial terjadinya aspek mutualisme antar individu dalam komunitas sosial, berlanjut pada perkembangan kognisi yang sifatnya dialektis sehingga melahirkan gerakan sosial.

Gerakan sosial juga memanfaatkan media komunikasi seperti media massa yang sifatnya impersonal. Meskipun demikian, gerakan sosial tetaplah sebuah gerakan yang berangkat dari asal-usul keresahan sosial yang diorganisasi menjadi sebuah gerakan menuntut perubahan. Sedangkan gerakan massa gerakan yang hadir secara spontan

Gerakan sosial terbentuk dengan melibatkan perencanaan dan biasanya berbentuk gerakan kultural yang dilakukan oleh agen-agen atau gerakan tokoh. Dia bergerak secara sistematis dan berkelanjutan. Pengertian yang dipakai tentang gerakan dewasa ini adalah Gerakan Sosial Baru (GSB) ia ditandai dengan sebuah penanggalan fenomenal yang berkembang ditahun 60-an terkait gerakan mahasiswa. Pengertian GSB juga membawa pengaruh perubahan terhadap gagasan demokrasi, yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh praktik marxisme.

Menurut Tauraine, GSB mamahami bahwa ditengah hasrat elit sosial untuk merubah ada potensi perbedaan yang hidup dalam perilaku dan kebudayaan masyarakat. Gagasan intelektual hanya mencoba untuk menghimpun menjadi kekuatan solidaritas, tetapi sering sekali tidak sensitif ketika mobilisasi dilakukan. Bagi Taurine, demokrasi tak boleh mengorbankan seseorang untuk kepentingan lainnya.

Menurut Melucci, perkembangan ini dilihat sebagai perkembangan radikal politik kontemporer (pasca perang dingin) yang memisahkan diri dari determinasi kelas. Ia berkembang secara nyata menjadi politik kolektif dan sosial diluar ruang kerja.

Munculnya gerakan di Aceh termasuk gerakan mahasiswa misalnya Pasca otoriterisme Orde Baru menunjukkan kesesuaian penggambaran diatas. Ketika otoriterisme Orde Baru kehilangan signifikansi, seperti lemahnya birokrasi menjalankan peran eksekutorial dan kekuatan militer yang tidak terkonsolidasi baik dalam mengontrol sosial maka muncullah banyak gerakan sosial baru yang mengambil alih situasi dominan itu. Situasi tersebut tidak hanya di dimanfaatkan oleh GAM/KPA, yang sebagian adalah korban kekerasan negara, tapi juga oleh organisasi dan kelompok pro demokrasi atau civil society Aceh.

Wacana tentang gerakan sosial sebagai disiplin kajian cukup populer sejak era 1970-an sampai dengan sekarang. Kata gerakan (movement) secara umum sering kali dipahami sebagai keinginan orang untuk bergerak menolak sebuah tatanan yang sudah ada demi mencari atau membentuk tatanan yang sudah ada demi mencari atau membentuk tatanan baru.

Gagasan ini sendiri sebenarnya bukan wacana baru kalau kita melihat bahwa sebelumnya telah ada wacana baru kalau kita melihat bahwa sebelumnya telah ada wacana tentang demokrasi dan pemerintahan rakyat yang menjadi dasar lahirnya sebuah gerakan sosial dan politik. Yang menjadi ciri yang membedakannya dari gerakan politik yang melibatkan massa banyak dan menuntut perubahan-perubahan fundamental dalam kehidupan politik.

Menurut David Plotke, seorang pakar di bidang kajian gerakan sosial, bahwa kajian Gerakan Sosial Baru (GSB) mencakupi beberapa pemikiran berkaitan dengan gerakan feminis , gerakan gay, lesbi, lingkungan hidup, gerakan rakyat (popular movement). Pemahaman yang paling penting dalam konteks tersebut adalah signifikansi terhadap ruang dan waktu inilah yang akan mengarahkan tujuan – tujuan sosial dan konteks relasi manusia pada masa lalu, sekarang dan masa depan.

Pengertian waktu pada era pramodern selalu terikat oleh penunjukan kalender yang berdasarkan skala harian, di mana setiap populasi masyarakat menghubungkan penunjukan waktu dengan ruang tidaklah persis sama dan bervariasi. Refleksi terhadap wacana gerakan sosial makin hari makin bertumbuh dengan makin menggumpalnya pengaruhnya di hampir seluruh dunia. Hal ini tentu menarik perhatian para analis dan praktisi gerakan sosial untuk

=====

merumuskan secara teoritik tentang apa yang dimaksud sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB).

Istilah ini sendiri memang bisa jadi hanya sekedar istilah, akan tetapi, ia juga dapat menjadi sebuah teori gerakan yang mengganti terminologi revolusi dan gerakan politik elite bangsawan dalam wacana perubahan sosial. Konsep GSB bukanlah hal baru, mengingat bahwa gerakan hak-hak masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, gerakan non-organisasi politik dan kepartaian, gerakan perempuan, lingkungan hidup telah lebih dahulu ada sebelum teori GSB diperkenalkan oleh para teoritis dan para praktisinya.

Yang paling menentukan dari perkembangan gagasan GSB adalah peran media publik yang terbatas ataupun luas dan pers yang menyebabkannya menjadi studi yang cukup penting berkaitan dengan perubahan sosial. Gerakan sosial dapat menjadi tawaran untuk perubahan dari masyarakat dengan kata lain revitalisasi konsep gerakan sosial yang berangkat dari kecermatan analisis terhadap struktur dan sistem sosial.

Namun tidak akan punya arti bagi gerakan sosial, perubahan sosial hanya satu efek yang diharapkan dari sebuah gerakan sosial. yang terpenting adalah terbentuknya tata nilai, kesadaran akan struktur dan konvensi sosial di dalam masyarakat, sehingga perubahan menuju sesuatu yang maju dan baru harus berangkat dari keinginan yang kongkret dari sebagian besar masyarakat. Dan saya rasa muncul gerakan sosial baru salah satu faktornya adalah lahirnya pemikiran kritis terhadap sosial.

Gerakan Sosial dan perspektif kritis

Untuk itu kita juga perlu mengkaji gerakan sosial secara kritis. Kajian sosial kritis di dalam ilmu-ilmu sosial lahir sebagai bentuk kritis segolongan ilmuwan sosial terhadap dominasi paradigma positivistik dan juga paradigma interpretatif. Paradigma Positivistik misalnya, merupakan sebuah paradigma yang sudah berurat berakar dan kukuh mendominasi alam pikir ilmuwan, bahkan seperti akan dijelaskan berikut ini, juga mendominasi pemikiran sebagian besar ilmuwan sosial dan agen-agen pembangunan dunia.

Kita mengetahui bahwa proses pengembangan ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu sosial, secara sadar atau tidak selalu dipandu oleh suatu paradigma sebagai acuan pendekatan yang dipilih oleh seseorang. Sebuah paradigma saintifik (scientific paradigm) merupakan suatu keseluruhan, sistem berfikir yang mencakup asumsi-asumsi dasar, pertanyaan penting yang akan dijawab atau teka-teki yang akan dipecahkan, maupun teknik riset yang digunakan, (Newman, 1997).

Dalam istilah Mansur Faqih (2002) paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu realitas. Kekuatan sebuah paradigma terletak pada kemampuannya membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta apa metode yang kita gunakan dalam

=====

meneliti dan berbuat. Apa yang disebut paradigma tersebut tidak selalu harus dinyatakan secara eksplisit dalam produk pemikiran atau kajian, namun ia akan mewarnai dan menentukan bagaimana sebuah produk pemikiran atau kajian.

Dalam perkembangan selanjutnya kajian-kajian ilmu sosial kemudian muncul beragam penyikap terhadap paradigma Positivistik atau paradigma pengetahuan instrumental tersebut. Sebagian ilmuwan berpandangan bahwa paradigma Positivistik tersebut tidak sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena kehidupan sosial, yang diyakini berbeda karakteristiknya dengan fenomena-fenomena alam.

Dari pergulatan yang berlangsung panjang bahkan hingga hari ini, kemudian dapatlah dipetakan adanya tiga paradigma utama dalam kajian –kajian ilmu sosial yang cukup dominan pengaruhnya dalam pembentukan teori-teori ilmu sosial. Setiap paradigma mewakili perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam cara memandang realitas sosial dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian terhadap gejala sosial.

Dengan kata lain ketiganya berbeda dalam cara melihat dunia, cara mengamati, mengukur dan memahami realitas sosial. Ketiga paradigma itu adalah positivisme (Positivism Social Science) yang sudah disinggung sekilas di atas, interpretif (Interpretif Social Science), dan kritik (Critical Social Science).

Ketiganya berbeda dalam memberikan jawaban atas delapan pertanyaan berikut : (1) mengapa seseorang harus melakukan penelitian ilmu sosial; (2) Bagaimana sifat dasar dari realitas sosial (pertanyaan ontologis) ; (3) Bagaimana sifat dasar dari kehidupan manusia; (4) Bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan awam (Common sense); (5) Apa yang membangun suatu penjelasan atau teori tentang realitas sosial; (6) Bagaimana seseorang menentukan apakah penjelasan yang dibuatnya benar apa salah; (7) Bagaimana kelihatannya bukti-bukti dan informasi yang baik; (8) Dimana kedudukan nilai-nilai sosial dan politik dalam ilmu pengetahuan.

Seperti disinggung secara ringkas di atas. Kajian sosial kritik aktual “ critical social science” dapat dirunut asal-muasalnya dari beberapa pemikir yang selama ini sering diberi label beralirab “kiri” seperti Karl Marx, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas,dll. Dalam lapangan politik mereka yang ada dalam kutub “kiri” ini seringkali diasosiasikan dengan aliran sosialis dan sosial demokrat. Oposisi mereka adalah yang dimasukkan dalam golongan “ kanan”, yang sering diasosiasikan dengan kapitalisme, konservatisme dan liberalisme.

Aliran teori sosial kritis berkembang dari para ilmuwan dan pemikir yang tergabung dalam Mazhab Frankfurt pada tahun 1930-an, yang salah satu tokoh awalnya adalah Max Horkheimer (1885-1973). Pengertian ‘kritik’, yang mereka gunakan dalam sebutan teori sosial kritis bermakna sebagai sikap kritis terhadap ajaran-ajaran di bidang sosial yang ada pada masa itu, dan juga kritis

=====

terhadap keadaan masyarakat pada masa itu yang sangat memerlukan perubahan radikal (Sunarto, 2006).

Mazhab Frankfurt juga menepatkan “kritik” sebagai program untuk merumuskan suatu teori yang bersifat emansipatoris tentang kebudayaan dan masyarakat modern, seperti seni, ilmu, pengetahuan, ekonomi, politik, dan kebudayaan pada umumnya yang bagi mereka telah menjadi rancu karena diselubungi oleh ideologi-ideologi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu sekaligus mengasingkan manusia individual dalam masyarakatnya (Sunarto,2006).

Lebih jauh, sebuah teori sosial menurut teori kritik bukan sekedar berurusan dengan benar atau salah tentang fakta atau suatu realitas sosial, tetapi bertugas untuk kemampuan memberikan proses penyadaran kritis atau perspektif kritis kepada masyarakat tentang bagaimana kepercayaan masyarakat telah membentuk realitas sosial tersebut (Faqih,2002).

Bagi teori kritik, kata Mansour Faqih, cita-cita akan keadilan sosial mustahil dapat dicapai tanpa melibatkan kesadaran mereka yang tertindas untuk terlibat dalam aksi refleksi kritis. Verifikasi kebenaran teori sosial menurut perspektif teori kritik juga diukur oleh rumus ataupun oleh angka, tetapi melalui verifikasi praktis yang berupa aksi masyarakat memiliki kesadaran kritis yang bertindak atas interest mereka sendiri.

Dengan demikian, kajian sosial kritik secara eksplisit memiliki dimensi aksi dan politis. Harapan dan peluang dimasa depan untuk kajian-kajian sosial kritis tak bisa tidak sepatutnya berangkat dari pemahaman apa yang sudah atau sedang terjadi dalam ranah kajian itu dimasa kini. Yang dapat disampaikan di sini adalah gambaran umum berdasarkan pengamatan dan pencermatan terhadap isu-isu yang selama ini banyak mengemuka dalam arus gerakan sosial.

Protes sosial sebagai embrio gerakan sosial

Sutoro Eko dalam artikelnya *protes sosial dan Reformasi Politik 2000* memaparkan bahwa Reformasi adalah sebuah jargon politik yang sangat populer dalam *corpus* besar politik Indonesia selama beberapa tahun terakhir, menyusul gelombang krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan Juli 1997.

Pada awal 1998 sejumlah intelektual terkemuka mempunyai ortodoksi baru bahwa krisis ekonomi tidak semata disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor politik.

Spesialis Indonesia kenamaan, Andrew MacIntyre (1999) misalnya, memperlihatkan bahwa krisis ekonomi Indonesia disebabkan oleh penyakit institusional yang kronis seperti merosotnya kredibilitas pemerintah di mata publik, sistem politiknya yang tidak demokratis dan mekanisme pembuatan keputusan yang terpusat di tangan Presiden Soeharto.

Tidak ada kekuatan institusional pada lembaga kepresidenan yang efektif, dan juga tidak ada lembaga-lembaga maupun aktor-aktor politik yang mampu mempengaruhi -- apalagi memveto -- pelaksanaan kebijakan yang ditempuh

=====

presiden dan memprakarsasi kebijakan alternatif yang lebih fundamental. Oleh karena itu, reformasi politik waktu itu diyakini sebagai kata kunci untuk penyelesaian krisis ekonomi.

Sejumlah intelektual terkemuka waktu itu secara lantang menyuarakan reformasi politik yang secara luas dimaknai sebagai demokratisasi sistem politik. Wacana reformasi semakin meluas di ruang publik, tetapi tidak ada kesepakatan bersama dalam merumuskan agenda reformasi. Elemen-elemen pendukung *status quo* cenderung bersikap defensif dan tidak mau menerima konsep reformasi yang disuarakan publik.

Oleh karena itu yang lebih banyak berbicara adalah parlemen jalanan, sebuah aksi protes sosial dan gerakan sosial di bawah pimpinan mahasiswa dan didukung oleh serpihan oposisi kelas menengah kota. Target utama parlemen jalanan adalah mundurnya Soeharto dari singgasananya, yang diyakini sebagai titik awal reformasi politik yang lebih luas.

Karena Soeharto sudah kehabisan legitimasi, maka dia tidak bisa membabi buta menghabisi kekuatan parlemen jalanan dengan tangan-tangan baja militer. Puncak dari protes sosial di tingkat nasional adalah kejatuhan Soeharto di bulan Mei 1998, yang kemudian membawa Indonesia memasuki masa transisi menuju demokrasi. Ciri khas utama transisi adalah ketidakpastian karena mandulnya lembaga-lembaga politik dan berlanjutnya mobilisasi massa (Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter, 1986).

Jika sebelum Soeharto jatuh, reformasi yang berkobar di seluruh penjuru kota diarahkan pada reformasi politik nasional, maka mobilisasi massa yang menyuarakan reformasi setelah jatuhnya Soeharto mengalami penyebaran ke seluruh pelosok Indonesia. Reformasi politik menjadi komoditas publik sehari-hari. Isu yang disuarakan tidak lagi berskala nasional tetapi berskala lokal. Seperti reformasi awal yang mendesak mundur Soeharto, reformasi politik lokal adalah diawali oleh gerakan sosial dengan mobilisasi massa yang menuntut mundur para pejabat lokal, dari Bupati sampai Kepala Desa.

Seperti halnya gerakan reformasi nasional lewat gerakan sosial yang dipimpin mahasiswa, semangat reformasi yang berkobar di tingkat lokal tampaknya hendak merombak tatanan politik lama yang tidak adil, dan yang lebih khusus adalah menjatuhkan para pemimpin lokal yang bermasalah atau mengidap penyakit "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Tetapi aksi reformasi yang digelar oleh elemen-elemen masyarakat lokal memperlihatkan semakin menguatnya masyarakat, dan paling tidak mempunyai pengaruh psikologis yang kuat di kalangan elite lokal maupun masyarakat luas. Aksi reformasi telah mempengaruhi wacana publik dan membuat elite-elite lokal dihantui "ketakutan" akan bahaya tindak KKN.

Fenomena protes sosial dan gerakan sosial pada tingkat lokal di Indonesia memang bukan fenomena baru. Jauh sebelum isu reformasi politik berkobar. Yang relatif baru pada era pasca-Soeharto adalah gelombang protes sosial yang

menyebarkan di hampir daerah, dan setiap protes sosial tidak lagi mengangkat isu-isu kebijakan pemerintah atau penggusuran tanah, tetapi berkobar relatif seragam sebagai gerakan sehari-hari untuk menjatuhkan para pemimpin lokal.

Protes sosial rupanya menjadi senjata utama bagi elemen-elemen masyarakat lokal untuk menyuarkan aspirasinya ketika saluran-saluran konvensional seperti partai dan parlemen tidak legitimate di mata publik.

Mulai sekarang protes sosial tetap saja menjadi saluran partisipasi yang penting ketika locus politik mengalami pergeseran dari level nasional ke level lokal. Di satu sisi meluasnya protes sosial merupakan elemen penting gerakan sosial masyarakat sipil untuk memperkuat demokrasi lokal, yakni untuk mengontrol kinerja masyarakat politik dan negara, tetapi di sisi lain protes sosial pada level empirik selalu mengandung kerawanan yang serius seperti terjadinya kekerasan dan kerusuhan sosial.

Kekerasan yang muncul dari masyarakat bagaimanapun merupakan bahaya bagi demokrasi, sebagaimana telah dibayangkan oleh para filsuf Yunani Kuno ketika mereka mengkritisi praktik demokrasi pada waktu itu.

Reformasi dipahami secara mendasar sebagai bentuk perubahan. Demikian juga dengan revolusi. Tetapi seorang jenderal di Indonesia mengatakan bahwa reformasi dan revolusi tidak berbeda, yakni sebagai perubahan politik secara total. Ia kelihatan phobi dengan istilah reformasi maupun revolusi, dan lebih suka menggunakan istilah pembaharuan secara gradual.

Sang jenderal itu tentu saja sangat dihantui oleh ketakutan akan perubahan yang mengancam posisinya. Tetapi orang yang tidak dihantui oleh ketakutan akan perubahan biasa memahami secara berbeda antara reformasi dan revolusi. Revolusi sering dipahami sebagai perubahan total dan cepat.

Revolusi sosial, demikian Theda Skocpol (1979, 1994), adalah perubahan yang cepat dan mendasar dalam masyarakat dan struktur kelas suatu negara; dan revolusi tersebut dibarengi bahkan menyebabkan terjadinya pemberontakan kelas bawah. Revolusi sosial harus dipisahkan dari berbagai jenis konflik dan proses perubahan lainnya, terutama yang disebabkan oleh kombinasi dua kejadian yang timbul secara kebetulan bersamaan; yaitu terjadinya perubahan struktur masyarakat dan pergolakan kelas, serta terjadinya perubahan politik dan perubahan sosial. Pemberontakan misalnya, sekalipun bisa berhasil dengan baik, mungkin saja melibatkan pemberontakan kelas bawah, tetapi tidak menyebabkan timbulnya perubahan struktural.

Transformasi sosial yang hadir dalam bentuk industrialisasi, urbanisasi, moneterisasi, komersialisasi, sekularisasi dan sebagainya, dapat mengubah struktur sosial tanpa harus menimbulkan, atau diakibatkan oleh, pergolakan politik yang tiba-tiba atau perubahan politik yang mendasar. Sedangkan revolusi politik adalah perubahan struktur negara tetapi tidak mengubah struktur sosial, dan revolusi politik tersebut tidak perlu dilakukan melalui konflik kelas.

Reformasi sebagai jalur transisi menuju demokrasi banyak terjadi di sejumlah negara. Kasus paling populer terjadi di Uni Soviet, ketika Mikhail Gorbachev pada tahun 1986 melancarkan perestroika dan glasnost, yang mengakhiri totalitarianisme dan sekaligus mengawali demokratisasi di negeri itu.

Di Korea Selatan, Roh Tae Woo seorang jenderal yang sebelumnya merupakan pendukung otoritarianisme, memulai reformasi setelah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1987. Di Brazil, reformasi politik tanpa gelombang gerakan sosial dan protes sosial telah diawali oleh liberalisasi politik presiden Ernesto Geisel (seorang jenderal berhaluan moderat) pada tahun 1973. Reformasi yang dirintis oleh Geisel dan penerusnya membuahkan transisi menuju demokrasi setelah digelar pemilihan umum secara demokratis pada tahun 1985.

Keputusan rezim memulai reformasi menuju demokrasi biasanya terjadi karena didasari pertimbangan kelompok elite bahwa kepentingan-kepentingan mereka jangka panjang akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis.

Tetapi jalur reformasi dari atas umumnya menghasilkan beberapa kecenderungan. Pertama, proses demokratisasi bisa saja dihentikan oleh pemegang kekuasaan karena situasi yang muncul pada masa liberalisasi itu dianggap terlalu mahal biayanya ketimbang biaya represi. Kedua, karena redemokratisasi dari atas itu dikaitkan dengan pemeliharaan kepentingan elite, maka kecenderungan yang terjadi adalah munculnya demokrasi terbatas. Ketiga, kekuatan militer akan terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan hak-haknya tetap ada dan hal ini sangat mengganggu proses redemokratisasi (Alfred Stepan, 1986).

Konsep "reformasi total" berbeda dalam soal derajat dengan konsep "reformasi parsial". Yang terakhir ini hanya mencakup pergantian pemimpin atau pemerintahan tanpa disertai dengan perubahan politik secara menyeluruh. Merujuk pada Donald Share (1987), konsep "reformasi parsial" itu identik dengan ekstriksi, yakni kejatuhan penguasa (pemimpin) yang diikuti dengan euforia politik.

Tentu saja ekstriksi dan euforia ini bukan semata karena kehendak penguasa atau karena konflik elite, tetapi muncul karena kebangkitan rakyat. Dengan kalimat lain, ekstriksi atau "reformasi parsial" adalah kejatuhan penguasa yang diikuti dengan liberalisasi politik. Sedangkan "reformasi total" tidak hanya mencakup kejatuhan penguasa, pergantian pemerintahan, dan liberalisasi politik, melainkan mencakup perubahan politik secara menyeluruh.

Dalam arena euforia itu, liberalisasi politik mengalami penyebaran ke seluruh penjuru Indonesia. Elemen-elemen masyarakat lokal langsung meluapkan aspirasinya dengan menggelar gerakan sosial untuk reformasi politik.

Masyarakat bawah tidak begitu peduli dengan konsep reformasi total seperti dibayangkan oleh kaum kelas menengah kota, apalagi reformasi total ini gagal

=====

diwujudkan. Dalam wacana lokal di era liberalisasi politik, reformasi sangat populer dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pemimpin yang bermasalah.

Seorang petani di desa misalnya bisa mengatakan: “Kepala Desa jatuh terkena reformasi”. Apa yang dimaksud dengan reformasi di mata masyarakat lokal sebenarnya hanya terbatas pada reformasi parsial atau ekstriksi. Pemaknaan ini merupakan sesuatu yang menarik, yang perlu dikaji lebih mendalam.

Definisi “protes sosial” sangat bervariasi, tergantung pada tempat, waktu dan siapa yang melakukan observasi terhadap fakta. Konsep protes sosial sering tumpang tindih dengan konsep-konsep lainnya seperti pembangkangan, pemberontakan, perilaku kolektif, aksi kolektif, demonstrasi, unjuk rasa, kekerasan sipil, gerakan sosial dan lain-lain.

Ahli gerakan sosial terkemuka, Charles Tilly (1981), rupanya lebih suka memakai istilah aksi kolektif ketimbang protes sosial, pembangkangan atau pemberontakan. Beberapa konsep yang terakhir itu, menurut Tilly, mencerminkan pendakwaan terhadap maksud dan posisi politik para aktor dari kacamata pemegang kekuasaan.

Secara substansial aksi kolektif sebenarnya tidak berbeda dengan protes sosial. Keduanya merupakan bentuk tindakan bersama massa untuk menantang (melawan) pemegang kekuasaan. Sydney Tarrow (1994) misalnya, mendefinisikan aksi kolektif sebagai perlawanan bersama oleh rakyat (people) dengan upaya bersama dan solidaritas dalam interaksi yang berlanjut dengan elite, musuh-musuhnya dan pemegang kekuasaan.

Aksi kolektif bisa hadir dalam bentuk asosiasi kepentingan, gerakan protes sosial, pemberontakan, pembangkangan, atau revolusi. Tetapi studi ini lebih menyukai konsep protes sosial ketimbang aksi kolektif, meskipun keduanya bisa saling dipertukarkan.

Mengapa? Pertama, dalam masyarakat selalu hadir penguasa dan rakyat yang dikuasai. Represi adalah sumberdaya yang dimiliki oleh penguasa, dan protes atau perlawanan adalah sumberdaya atau senjata milik rakyat (James Scott, 1985). Kedua, dibanding dengan aksi kolektif, protes sosial tampaknya jauh lebih eksplisit, provokatif dan lebih membumi dalam konteks masyarakat lokal di Indonesia.

Aksi kolektif barangkali bisa hadir sebagai perlawanan pasif, sedangkan protes sosial adalah perlawanan secara aktif dan terbuka. Ketiga, protes adalah gerakan massa yang lebih jelas, yang tidak semata-mata karena tidak puas atau emosi untuk merusak tatanan sosial-politik, melainkan gerakan yang rasional dan disengaja untuk mengawali perubahan politik.

Di sisi lain, dalam berbagai literatur ditemukan sebuah pemahaman bahwa gerakan sosial tampil tidak sekadar protes, pembangkangan, pemberontakan dan sebagainya. Tetapi teori gerakan sosial “lama” yang sangat reduksionis dan dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural sama sekali tidak membedakan

dengan tegas perbedaan antara protes sosial dan gerakan sosial. Protes sosial adalah strategi yang inheren dalam gerakan sosial.

Gerakan sosial sering dipahami sebagai aksi bersama nonkelembagaan yang memiliki komponen-komponen pasti seperti ideologi, program atau seperangkat tujuan, taktik-taktik untuk mencapai tujuan, dan aktor sebagai pemimpin, serta menawarkan perubahan atau perlawanan terhadap suatu perubahan dalam masyarakat (Ralph Turner dan Lewis Killian, 1972). Bahkan Herberle (1951) melihat gerakan sosial sebagai bentuk perilaku politik kolektif nonkelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan.

Cara pandang yang reduksionis itu dikritisi oleh pendukung “teori baru” gerakan sosial. Para teoritis baru telah merumuskan kerangka kerja yang memandang gerakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kelompok atau kepentingan sosial dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas.

Touraine (1971), misalnya mencatat bahwa dalam masyarakat pascaindustri, gerakan kelas buruh atau gerakan serikat buruh tidak berada lagi di pusat konflik masyarakat. Kelas buruh, demikian tulis Touraine (1971), bukan lagi pelaku sejarah yang istimewa, bukan karena gerakan buruh lemah atau tunduk kepada strategi partai politik tertentu, ataupun karena pemimpin yang buruk; tetapi lebih dikarenakan penggunaan kekuasaan di dalam perusahaan kapitalis tidak lagi menempatkan seseorang pada pusat sistem ekonomi dan konflik sosialnya.

Teori-teori baru gerakan sosial justru melihat gerakan sosial sebagai usaha untuk menghasilkan transformasi mendasar dalam hakikat praktek politik maupun teori tentang gerakan sosial itu sendiri.

Mereka juga menjelaskan bahwa salah satu ciri gerakan sosial baru adalah penolakannya atas analisis sosial yang didasarkan kepada pembagian ruang politik menjadi dua kubu yang saling bertentangan secara tegas (borjuis dan proletar).

Dalam situasi baru, keberagaman aktor sosial memapankan kehadiran ruang autonomi mereka dalam lingkungan sosial dan politik yang terfragmentasi. Berdasarkan analisis dan pengamatan mereka, dipahami bahwa untuk menilai dampak gerakan sosial maka gerakan sosial harus dipahami dan ditempatkan dalam konteks proses demokratisasi yang sangat luas. Proses demokratisasi ini merupakan proses transformasi sosial atas aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, dan politik maupun aspek kehidupan lainnya.

Baik mengikuti “teori lama” maupun “teori baru” gerakan sosial, protes sosial tetap merupakan strategi dan taktik yang inheren dalam gerakan sosial. Protes sosial bisa dikatakan sebagai gerakan sosial berskala rendah atau sebagai embrio dari gerakan sosial yang menyeluruh untuk mendorong transformasi (perubahan) sosial. Ini bukan karena setiap gerakan selalu tampil dengan wajah yang keras dan ekstrem, tetapi karena protes sosial merupakan sumberdaya

yang utama sebagian besar orang untuk melawan musuh-musuhnya yang mempunyai perlengkapan lebih komplet.

Setiap protes sosial pasti mempunyai jaringan sosial rakyat, punya wacana ideologi, dan perjuangan politik. Lingkaran protes sosial tentu tidak muncul begitu saja sebagai bentuk ekspresi spontan ketidakpuasan atau emosi yang meluap, melainkan mempunyai tahap-tahapan yang sistematis untuk mencapai sasarannya. Smelser menyatakan terdapat enam tahap dalam perkembangan suatu gerakan sosial.

1. *Structural conduciveness* menunjukkan pada suatu kondisi atau keadaan yang memungkinkan munculnya suatu gerakan sosial, sebagai suatu contoh, masyarakat yang didominasi oleh kaum pria dimana kaum wanita dieksploitasi dan dijadikan warga kelas dua merupakan suatu kondisi awal bagi munculnya suatu gerakan perempuan.
2. *Structural strain* terjadi apabila di dalam masyarakat yang secara struktural telah terkondusif bagi munculnya suatu gerakan, berlangsung perasaan tidak puas dikalangan anggota-anggotanya. Warga masyarakat dalam hal ini merasakan ketidakpuasannya terhadap kondisi yang ada di sekelilingnya.
3. *Growth an spread of generalized belief*. Pada tahap ini dikalangan anggota masyarakat ditumbuhkan dan disebarkan keyakinan atau kepercayaan yang sifatnya umum. Adapun artinya, kepada anggota masyarakat diyakinkan bahwa kondisi yang ada di sekelilingnya tidak memuaskan dan perlu diadakan perubahan.
4. *Precipitating factors*. Tahap ini menunjukkan adanya suatu peristiwa tertentu yang dapat mempercepat dan mengobarkan munculnya suatu gerakan sosial. Tahap ini dapat dinyatakan tahap yang memacu kemunculan suatu gerakan sosial.
5. *Mobilization of participants for action*. Tahap ini terjadi setelah berlangsungnya suatu peristiwa yang menyulut sentimen dan rasa solidaritas massa. Dengan adanya peristiwa tersebut maka massa atau anggota masyarakat dibujuk untuk terlibat dalam suatu gerakan. Dalam hal ini peran yang dipunyai pemimpin untuk memobilisir dan mengorganisir massa sangatlah penting. Tanpa adanya pengaruh dari pemimpin terhadap anggota masyarakat untuk bergerak, maka akan mudah sekali rintisan munculnya suatu gerakan sosial dapat digagalkan.
6. *Application of social control*. Kontrol sosial pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan terhadap gerakan. Persoalannya adalah apakah yang ada pada tangan penguasa digunakan untuk menghancurkan gerakan atautkah justru kontrol sosial tadi menjadikan gerakan sosial tersebut semakin berkembang dimana solidaritas pengikut gerakan semakin tinggi.

=====

Merujuk beberapa studi, mulai dari Smelser hingga Charle Tilly (1975) maupun Robert Ted Gurr (1970), setiap protes sosial melawati beberapa tahapan strategis.

1. Tahap pertama, pernyataan spontan tentang ketidakpuasan bersama. Suatu gerakan sosial berawal ketika orang merasa tidak puas terhadap struktur sosial yang ada disekelilingnya. Sebagian dari mereka kemudian mengelompokkan diri dan menyatakan pandangan tentang ketidakpuasannya. Dalam tahap ini suatu gerakan sosial menampakkan diri sebagai tindakan bersama yang sifatnya spontan. Fungsi yang penting dari tahap pertama ini adalah untuk menarik perhatian massa (publik) yang diharapkan dapat memberikan dukungan untuk berlangsungnya suatu gerakan sosial.
2. Pemilihan pimpinan gerakan. Tahap ini berawal ketika beberapa individu menyatakan bahwa perubahan sosial yang diusulkan mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil. Individu-individu ini biasanya akan berperan sebagai pimpinan dan sebagai pimpinan mereka mulai memberikan arah bagi berlangsungnya gerakan. Fungsi yang penting dari tahap ini adalah diterimanya beberapa individu sebagai pimpinan gerakan.
3. Transformasi tindakan tidak berstruktur menjadi tindakan yang terorganisir. Tahap ini sering disebut sebagai periode pengorganisasian dan perencanaan. Pada tahap ini tindakan yang tidak berstruktur yang terjadi pada tahap pertama ditransformasikan menjadi suatu tindakan yang terorganisir. Sehubungan dengan hal tersebut maka peranan pimpinan gerakan menjadi sangat penting. Pimpinan harus mampu merumuskan tujuan-tujuan antara yang membimbing tercapainya tujuan akhir dari gerakan. Dalam hal ini memang pimpinan gerakan harus melakukan banyak pekerjaan sebelum tindakan yang bersifat spontan dan tidak terorganisir berubah menjadi suatu gerakan sosial yang teratur dan terarah dengan baik. Salah satu tugas para pimpinan gerakan yang penting adalah menjelaskan tujuan yang dicanangkan kepada para pengikutnya sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas ke arah mana mereka bergerak.
4. Konfrontasi dengan "musuh" gerakan. Pada tahap ini suatu gerakan sosial benar-benar dalam puncak keseriusan dan mengajukan tuntutan dan berusaha sekuat mungkin demi diterimanya tuntutan tadi. Pada periode ini gerakan berada dalam posisi berhadapan dengan "musuhnya", yaitu pihak-pihak yang mengalami kerugian apabila kondisi "status quo" yang ada diguncang oleh gerakan. Tahap ini dapat merupakan tahap yang relatif singkat apabila gerakan dan "musuhnya" dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi dimungkinkan pula tahap ini merupakan periode yang relatif lama dan hal ini dapat berlangsung apabila gerakan dan "musuhnya" sama-sama mempunyai kekuatan yang seimbang dan tidak bersedia menyerah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini kedua-belah pihak, gerakan dan musuhnya,

=====

berusaha sekuat tenaga untuk melakukan negosiasi dan pemecahan masalah yang dihadapi demi keuntungan masing-masing pihak. Esensi dari tahap ini adalah dapat dinyatakan sebagai periode dimana gerakan berkonfrontasi dengan “musuhnya” dan memaksa “musuhnya” tadi untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya.

5. Pencapaian hasil. Tahap ini merupakan dimana orang menyaksikan apakah gerakan yang sudah dan tengah berlangsung mampu atau tidak mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berakhirnya suatu gerakan, masyarakat akan mengadaptasi pola tindakan yang baru yang muncul dari persaingan antara gerakan dan “musuhnya”. Jika gerakan sukses biasanya diperlukan waktu yang cukup untuk menyebarluaskan pola tindakan yang baru tadi ke seluruh lapisan masyarakat. Jika gerakan gagal, para partisipan membubarkan diri atau mungkin merumuskan kembali tujuan yang telah ditetapkan dan mencoba meraihnya melalui gerakan yang baru.

Protes sosial adalah perlawanan kolektif terhadap pemerintah yang berjangka pendek dan spontan untuk mencapai sasaran reformasi, yang bisa menghasilkan perubahan kebijakan pemerintah, runtuhnya pemerintahan dan perubahan struktur politik.

Tipe aksi kolektif dan perubahan

Tipe aksi	Protes Sosial	Gerakan Sosial	Revolusi Sosial
Strategi	Perlawanan kolektif massa terhadap pemerintah	Penyadaran dan penguatan masyarakat, pengorganisasian dan perlawanan kolektif	Radikalisasi, pengorganisasian yang matang, dan pemberontakan kelas bawah
Durasi	Pendek dan spontan	Jangka panjang, berkelanjutan	Spontan dan frontal ketika kondisi obyektifnya sedang matang
Sasaran	Reformasi politik	Transformasi sosial budaya	Revolusi
Hasil perubahan	Perubahan kebijakan, runtuhnya penguasa, perubahan struktur politik	Perubahan gradual dan mendasar terhadap struktur sosial, budaya dan politik.	Perubahan mendasar struktur sosial dan politik.

Analisa ini, sekali lagi, masuk ke dalam ranah protes sosial, sebagai embrio gerakan sosial. Kalau mengikuti tradisi Marxis, bahwa protes sosial adalah bentuk konflik sosial, tetapi konflik yang terjadi bukanlah antara kelas buruh

=====

melawan kapitalisme, melainkan konflik elemen-elemen masyarakat melawan negara atau elemen-elemen massa melawan kelompok elite.

Dalam kerangka protes tersebut, kelompok massa melakukan perlawanan kolektif terhadap pemerintah, dalam tempo yang pendek dan spontan, untuk mencapai reformasi politik. Jika protes sosial tersebut sukses, maka akan diikuti dengan jatuhnya penguasa sampai dengan perubahan kebijakan dan struktur politik.

Protes sosial bukan sekadar perilaku menyimpang yang dilakukan secara kolektif oleh kumpulan orang-orang jalanan yang punya mental kerumunan (*crowded mental*), melainkan sebagai bentuk konflik yang tumbuh dalam konteks sosial masyarakat.

Argumen yang pertama ini menampik pandangan fungsionalisme struktural yang selalu menilai protes sebagai perilaku kolektif yang merusak tatanan sosial yang mapan, dan sebaliknya lebih banyak merujuk pada tradisi Marxis. Akan tetapi konflik dalam protes sosial itu tidak dipahami dalam kerangka teori konflik "lama" yang berpusat pada konflik kelas, melainkan dipahami dalam kerangka teori konflik "baru" yang difokuskan pada konteks konflik antara masyarakat dan negara.

Konflik sosial ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan negara seperti dibayangkan oleh Marxisme ortodoks, melainkan sebagai upaya untuk reformasi politik, serta sebagai embrio gerakan sosial untuk mendorong demokratisasi, mengurangi hegemoni negara di hadapan masyarakat, dan penguatan elemen-elemen masyarakat sipil.

Aktor-aktor strategis dalam masyarakat yang terlibat dalam konflik (protes sosial) tidak lagi berpusat pada buruh dan tani, melainkan berpusat pada elemen-elemen kelas menengah perkotaan.

Dalam konteks konflik antara negara dan masyarakat itu pula, Vincent Boudreau (1996) secara menarik membuat dua tipe gerakan sosial. Pertama, adalah tipe "gerakan utara" (di kawasan negara-negara kapitalis-demokratis yang sudah mapan), yang ditandai dengan gerakan menekan dan merubah kebijakan pemerintah. Kedua, adalah tipe "gerakan selatan" (di negara-negara otoriter-kapitalis atau negara-negara kapitalis-demokrasi yang masih bayi) yang umumnya diarahkan untuk mengurangi kontrol negara, memperbesar sumberdaya masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dominasi negara.

Di Indonesia, gelombang gerakan sosial dan protes sosial tampaknya bisa dikategorikan sebagai tipe yang kedua ketimbang yang pertama. Tampilnya berbagai organisasi sosial dan meluasnya protes sosial selama dua tahun terakhir merupakan upaya elemen-elemen masyarakat menekan negara (pemerintah) untuk mengawali reformasi, demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil. Di negeri ini, selama tiga dasawarsa terakhir, hampir tidak pernah muncul gerakan pemberontakan atau kudeta yang hendak

menggantikan penguasa. Gelombang protes sosial yang menjatuhkan penguasa adalah awal dari reformasi politik menuju demokratisasi.

Beberapa Gerakan di Aceh sebagai Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial di Aceh saya kira sudah lama berjalan, semasa konflik gerakan-gerakan sipil banyak bermunculan walaupun masih tidak tampak ke permukaan. Ketika isu militerisme dan HAM diangkat pada awal 1998 hingga 1999, hampir seluruh kelas sosial yang disebutkan di atas mengampanyekan hal yang sama.

Terbangun aliansi tentatif antar mahasiswa dan kelas sosial lainnya, terutama para aktivis LSM dan santri. Eskalasi kekerasan juga melahirkan sikap yang terus berkembang di kalangan kelas sosial. Pasca-Mei 1998, ketika konsolidasi rezim utama tumbang, lahirlah bintang-bintang kekuasaan baru, bahkan bintang kekuasaan yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara sebelumnya. Misalnya dari hanya 150 orang, telah menjadi sebuah kekuatan kombatan baru di tengah masyarakat dan ditakuti.

GAM bukan hanya tumbuh sebagai kekuatan milisia dengan peran koersifnya, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga hukum negara seperti polisi dan kejaksaan. Hal ini tidak lain karena citra kekuatan hukum yang sebelumnya tidak mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.

Peran polisi lebih banyak kepada aksi polisionil (pemata-mataan aktivitas masyarakat) dibanding sebagai lembaga yang bertugas melindungi dan melayani. Selain itu banyak sekali bermunculan lembaga sipil yang berjuang memperjuangkan nasib masyarakat.

Sebut saja seperti FKMAAB (Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh Bandung), FOKUSGAMPI (Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie), FOSMATA (Forum Solidaritas Mahasiswa Aceh Yogyakarta), FPDRA (Front Perjuangan Demokratik Rakyat Aceh), GSB (Gerakan Sosial Baru), IPAU (Ikatan Pemuda Aceh Utara), KAMPI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Pidie), KARMA (Kesatuan Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh), KMPAN (Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara), KOMPAS (Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau), Pemraka (Peuduli Mahasiswa dan Rakyat Aceh), SIRA RAKAN (Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian), SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh), SmuR (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat), Somaka (Solidaritas Mahasiswa untuk Kasus Aceh), SU-MPR (Sidang Umum Majelis Pejuang Referendum), KPA (Komite Peralihan Aceh).

Belakangan juga lahir bentuk-bentuk gerakan sosial bersifat kebudayaan yang terkoordinir dalam sebuah wadah organisasi sebagai contoh KPA (komite peradaban Aceh), KRA (komunitas Ranup Aceh), Tikar Pandan, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan perempuan juga bermunculan di Aceh. Dan saya kira beberapa kegiatan bersifat kontemporer yang dilakukan kampus seperti *sekolah budaya berbasis sosial* dengan melibatkan para budayawan, seniman, wartawan

=====

dan mahasiswa juga gerakan sosial baru. Termasuk program Aceh Flower Generation.

Kampus dan gerakan sosial

Kampus merupakan tempat lahirnya ide-ide baru, gagasan, gerakan sosial baru. Kampus sebagai tempat terjadinya perdebatan teori-teori, tempat terjadinya perubahan sosial, tempat gerakan sosial lahir lebih dinamis—dibandingkan dengan elemen lain.

Universitas adalah gerakan berdasarkan atas asas keuniversalan dan keobjektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran, kebebasan akademik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, kesejahteraan dan kerohanian serta kebangsaan, demokrasi, otonom dan kemasyarakatan. Universitas adalah fondasi tata kehidupan dunia baru. Universitas berfungsi membangun ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pembangunan yang secara konprehensif dapat menangkap fenomena secara holistik.

Juga tempat bertanya, kreator dan inovator, penyebar dan pengawal kebudayaan, serta pelestari vitalisasi bangsa. Kampus adalah wilayah yang merdeka ketika melaksanakan fungsinya dalam mengungkapkan kenyataan dan kebenaran, fakta dan realitas sosial, obyektifitas dan universalitas ilmu pengetahuan.

Perubahan global, globalisasi dan komodifikasi pengetahuan dan teknologi, revolusi teknologi informasi dan munculnya wacana kematian universitas (*The End Of University*) sebagai *agen* perubahan. Universitas juga mesti melakukan kontekstualisasi dan revitalisasi atas komitmen pada nilai-nilai yang telah dipilih sejak awal kehadirannya.

Untuk itu eksplorasi tentang implikasi kebijakan untuk mengukuhkan kembali peran dan fungsi sebagai pengawal (*gatekeepers*) kebudayaan, sebagai sebuah “*culture-conserving*”, “*culture-creating*”, “*civilizing institution*”, “*Flexibilitas*”, “*resourceful*”, “*improvisatoris*”, “*versatile*”. Dengan kata lain Universitas berperan sebagai pengembangan budaya (*culture-conserving and culture-creating institution*) dalam proses “pengadaban” (*civilizing*), “liberasi” dan “humanisasi” (*humanizing*) anak bangsa dari berbagai penindasan, ketidak-adilan dan dehumanisasi yang bercirikan wawasan luas, dibangun berawal dari sebuah idealisme.

Kita tidak mesti terperangkap ke dalam paham *fundamentalisme pendidikan* yang menolak pertimbangan filosofi dan/atau intelektual. Yang menganggap bahwa tujuan pendidikan tidak lebih dari pelestarian dan keberlanjutan pola-pola sosial dan tradisi masa lalu (baca: O’niel, 1981 dan 2001; Nelson, Carlson dan Palonsky, 1996.). John Dewey (Bowles dan Ginting, 1976), seorang tokoh ahli pendidikan liberal menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi “*integratif*” dalam mengintegrasikan anak atau subjek didik ke dalam berbagai peran kewarganegaraan, fungsi “*egalitarian*”

=====

untuk memberikan kepada semua warga negara kesempatan memperoleh pendidikan, fungsi “*developmental*” bagi perkembangan psikis dan moral anak didik.

Dihadapan perubahan global yang dasyat dibawah tekanan ekspansi globalisasi neo-liberal saat ini dan di masa depan. Benarkah globalisasi kapitalisme yang oleh Robertson (2003) yang disebut globalisasi gelombang ke tiga itu menawarkan peluang yang lebih menjanjikan bagi untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan pilihan identitas, jati diri, budaya, solidaritas, kemanusiaan dan nilai-nilainya di masa depan?

Kita tahu, logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ke tiga diturunkan dari ideologi neo-liberalisme, yang didalam filsafat politik kontemporer memiliki afinitasnya dengan ideologi libertarianisme yang rentang melampaui batasnya yang ekstrim. Seperti halnya dengan libertarianisme yang membela kebebasan pasar dan menuntut peran negara yang terbatas-marjinalisasi kekuasaan dan terbatasnya otoritas akses negara dunia ketiga. Maka peluang aktualisasi identitas, revitaliasi jati diri, nilai luhur, kearifan lokal menjadi perhatian prioritas bagi semua universitas tidak terkecuali Indonesia bahkan Aceh.

Oleh karena banyak peristiwa telah terjadi dalam bidang demografi, ekologi, geo-politik, geo-ekonomi, sosial-budaya, meningkatnya intensitas *culture cross communication*, dominasi aliran politik, budaya, ekonomi tertentu. Semakin menguatnya kesenjangan sosial dan ekonomi dunia. Sebagai perbandingan laporan UN *Human Development Report* tahun 1996 (Tehrania, 1999), bahwa 20 persen penduduk terkaya di Dunia menerima lebih dari 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen penduduk paling miskin hanya menerima 1,4 persen.

Kenyataan itulah yang antara lain telah menjadi alasan Tehranian untuk menyebut abad ke-20 sebagai “abad kematian yang direncanakan” (*a century of death by design*). Bahkan kemudian banyak cendekiawan terkemuka menguraikan terjadinya “kematian” banyak hal yang selama ini menjadi fondasi dari tata kehidupan dunia. Mulai dari “*the end of ideology*”, “*the end of history*”, “*the end of moderdity*”, “*the end of journalism*”, “*the end of geography*”, “*the end of racism*”, dan “*the end of work*” bahkan sampai dengan “*the end of university*”.

Berkaitan dengan isu terakhir tentang “kematian universitas”, dalam perannya sebagai gerakan sosial baru, globalisasi telah membuat universitas semakin kehilangan otonominya mewujudkan peran dan fungsinya untuk membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk penindasan, ketidak-adilan dan dehumanisme.

Apa yang dikhawatirkan oleh Kline (1995) akan dapat terjadi pada perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini. Meminjam argument Schiller (webster, 1995), di tengah era globalisasi teknologi informasi diseluruh dunia terutama di negara berkembang/dunia ketiga, universitas semakin

tidak memiliki kemampuan untuk mencegah hadirnya paling sedikit tiga ragam perubahan sangat problematik.

Pertama, sebagai implikasi dari semua itu, universitas harus menyaksikan hadirnya dinamika perkembangan masyarakat yang dikendalikan oleh “kriteria-kriteria pasar” demi alasan keuntungan. Sentralitas prinsip-prinsip pasar pada gilirannya telah menghasilkan terjadinya “*komodifikasi*” dan “*komersialisasi*” informasi, dengan demikian hanya akan menjamin ketersediaan informasi sejauh ia menghasilkan keuntungan.

Kedua, Globalisasi teknologi informasi juga telah mengakibat masyarakat dan ekonomi kita semakin tumbuh menjadi sebuah “*corporate capitalism*” yang akan didominasi oleh institusi-institusi korporatis di dalam bentuk organisasi oligopolistis bahkan monopolistis. Robert heilbroner 1984, dalam bukunya: “*Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*” mengungkapkan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem perekonomian dimana alat-alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan yang sistem pembagian pendapatan ditentukan oleh persaingan pasar.

Ketiga, sebagai hasil dari keduanya, yang telah dan akan kita saksikan semakin transparan dihadapan kita mata publik adalah meningkatnya kesenjangan kelas (*class inequality*). Dalam konteks pemanfaatannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, juga berarti bahwa hanya mereka yang berada pada lapisan atas dalam struktur sosial yang memperoleh keuntungan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Akan tetapi benarkah, fungsi dan peran universitas, memang tengah menuju ke ambang kematian? Pertama kali harus kita pahami bahwa, bahwa penggunaan konsep kematian universitas, seperti halnya konsep kematian ideologi, sejarah, demokrasi, jurnalism, modern dan lain-lain, jelas untuk menciptakan suatu “*sense of crisis*” dan “*sense of emergency*” bahwa suatu tindakan atau kebijakan perlu segera dilakukan untuk mencegah menurunnya kemampuan universitas dalam mewujudkan peran dan misinya sebagai lembaga konservasi dan penciptaan kebudayaan.

Jean Baudrillard dalam *Tehranian* 1996, menyebutkan bahwa semua konsep metafora pengertian “kematian” dirumuskan diatas konsep yang bersifat linier. Di era-pos-modernisme-linieritas memang akan selalu berkembang menuju kematiannya.

Akan tetapi diseberang kematian itu *trajektori-trajektori* maknanya akan senantiasa menciptakan ideologi-ideologi baru, sejarah-sejarah baru, gerakan-gerakan sosial baru, jurnalism baru, geografi-geografi baru, teori-terori baru dan universitas-universitas baru dan berbagai hal baru lainnya, oleh karena itu dalam era pos-modernisme setiap kejadian akan menemukan liberasi bagi dirinya sendiri.

Liberasi universitas misalnya akan tercipta kembali dan ini diperlukan tinjauan secara kritis oleh semua cendekiawan agar jangan sampai salah langkah dan

=====

strategi. Untuk itu, peran dan fungsi universitas di era post-realist, post-modernisme-globalisasi teknologi informasi yang semakin 'semu'. Dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam berbagai bidang. Termasuk dalam membentuk karakter manusia bermoral, berbudaya yang memiliki identitas diri, jati diri dan integritas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Manusia dilahirkan tidak dengan moralitas, moralitas tumbuh atas bentukan ilmu dan budayanya.

Ilmu dan Budaya lahir karena adanya pola tingkah laku manusia dan pikiran manusia, ketika manusia berhenti berpikir maka eksistensinya akan hilang sebagai manusia berilmu dan berbudaya. Demikian juga dengan eksistensi diri suatu bangsa, ketika secara keilmuan dan kebudayaan kita kehilangan pegangan, maka secara bersamaan kita kehilangan jati diri---kita kehilangan arah pijakan ilmu pengetahuan. Kampus akan dapat melahirkan gerakan-gerakan pembaharu dalam masyarakat, ketika kampus merdeka, mandiri.

Bahan Bacaan

Amir, Piliang Yasraf, 2004 *Pos Realitas (Realitas kebudayaan Dalam era post metafikasi, penerbit jalasutra.*

AS Hikam, Muhammad, 1999 *Demokrasi dan Civil Society.* Penerbit Pustaka LP3ES

B Lubis, Zulkifli, 2005 *Masa depan kajian sosial kritis di Indonesia.* Makalah dalam *sekolah budaya berbasis sosial.* Antropologi Unimal

Eko, Sutoro, 2000 *Protes Sosial dan reformasi politik (artikel).* Penerbit Buletin IRE

Faqih, Mansour, 2001 *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,* Penerbit Pustaka pelajar & Insist Press.

Fukuyama, Francis, 1992 *Kemenangan Kapitalisme dan demokrasi Liberal.* Penerbit Qalam Yogyakarta.

Fiske, John, 1990 *Culture and communication Studies.* Penerbit Jelasutra

Huntington, Samuel P., 2002 *benturan antar Peradaban dan masa depan Politik Dunia.* Penerbit Qalam Yogyakarta.

Hasan, Kamaruddin, 2004 *Budaya global VS budaya lokal (artikel) koran Rakyat Aceh.*

Hasan, Kamaruddin, 2005 *kosmopolitanisme Aceh Baru (artikel) koran rakyat Aceh*

Ibrahim, Idi Subandi, 1997 *Hegemoni Budaya*

Kemal Fasya, Teuku, 2005 *Ritus Kekerasan dan Libido Nasionalisme.* Penerbit BukuBaik dan ELSAM

=====

Sumantri, S.Gumelar, 2005 Gerakan Sosial di Indonesia (makalah dalam sekolah budaya berbasis Sosial) Antropologi Unimal

Soedjatmoko, 2001 Kebudayaan Sosialis. Penerbit melibas, Jakarta

=====

*Paper: Sebagai bahan Workshop **Camp Peace / Perdamaian** selama 3 hari, diselenggarakan oleh "Aceh flower Generation", bekerja sama dengan **American Friends Service Coomitte** di Lhokseumawe tanggal 22-25 April 2006.*